

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang dipakai penulis dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik yang hampir sama antara lain:

Satu, penelitian yang dilakukan oleh (Ferlia, Setiyowati, et al. 2023) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang disebarkan kepada pejabat yang bersentuhan langsung dengan laporan keuangan desa sebanyak 56 pejabat. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa bahwa akuntabilitas, transparansi dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Zubaidah & Nugraeni, 2023) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman”. Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Sleman. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang efektif dan penyediaan layanan publik. Penelitian akan berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini melibatkan pegawai SKPD kecamatan yang bekerja di bidang keuangan. Sampel populasi terdiri dari 36 pegawai SKPD bidang keuangan.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner dan analisis statistik. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, transparansi laporan keuangan, dan pengungkapan informasi adalah cara untuk mengukur akuntabilitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh. Penelitian ini memiliki konsekuensi nyata bagi pemerintah daerah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Arnova and Lestari 2024) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Kembang Seri”. Penelitian ini bertujuan meneliti dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di Desa Kembang Seri, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bertanggung jawab dalam mengatur keuangan dengan baik dan memberikan layanan publik. Laporan keuangan yang baik penting untuk memastikan dana publik digunakan dengan tepat dan didokumentasikan dengan baik. Penelitian akan dimulai pada tahun 2024.

Penelitian ini melibatkan empat orang dari Desa Kembang seri dan pegawai di bidang keuangan. Jumlah sampel terdiri dari 4 orang dari Desa Kembang seri dan 3 pegawai keuangan. Penelitian ini memakai kuesioner untuk mengumpulkan data dan menganalisis statistik. Analisis ini menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan program komputer SPSS versi 25 untuk Windows. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Saat ini, akuntabilitas tidak berdampak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (A. P. Musa, Abdullah, and Hasan 2023) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sistem pengendalian internal dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam pembentukan kualitas laporan keuangan terutama di Perintahan Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden kepada seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memengaruhi secara signifikan kualitas laporan dan akuntabilitas berpengaruh positif tidak bersignifikan terhadap kualitas laporan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Lestari 2023b) dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas dalam Mempengaruhi Kualitas Laporan

Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi”. Penelitian ini menyelidiki bagaimana transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di pemerintahan daerah Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 30 SKPD Pemerintahan Kota Sukabumi, yang terdiri dari 102 individu. Semua populasi diambil sebagai sampel dalam metode non probability sampling. Penyebaran kuesioner kepada responden adalah metode pengumpulan data. Alat analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan kontribusi sebesar 69,2% dan 30,8% dipengaruhi faktor lain.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Palalangan 2019) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi, uji f, dan uji t dengan menggunakan software SPSS for windows.

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan; dan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh (Syafudin 2021) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh (Heinrich and Probohudono 2023) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Sampel penelitian terdiri dari 119 responden yang berasal dari 38 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten

Kaimana, yang terdiri dari pimpinan OPD, Kasubbag keuangan, bendahara, dan APIP/Auditor Internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim et al. 2024), dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)”. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Akuntabilitas Dan Variabel Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuisioner yang pengukurannya menggunakan skala likert. Proses pengumpulan sampelnya menggunakan purposive sampling atau sampel dengan kriteria tertentu yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan akses peneliti menuju lokasi sampel dengan total sampelnya 117 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) atau Model Persamaan Struktural yang dioperasikan melalui program AMOS 24. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al. 2024), dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021”. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan kuesioner. Jenis data adalah data kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Tanah Datar sebanyak 55 orang dengan pengambilan sampel secara purposive sampling maka jumlah sampel berjumlah 31 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara simultan / bersama - sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh (Irenius and Ayudiati 2024), dengan(Sulastri, Nugroho, and Nurodin 2020) judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023”. Penelitian ini metode kuantitatif hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Transparansi berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal dan Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh (Sulastri et al. 2020), dengan judul “The Effect Of Government Internal Control System (SPIP) And Regional Management Information (Simda) On The Quality Of Financial Reports” . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah saja yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan secara stimulan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nur, Sopanah, & Puspitosarie, 2023) dengan judul berjudul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan” mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, secara parsial, pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dalam mendukung kualitas laporan keuangan yang lebih baik di sektor publik. Meskipun pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi dianggap penting, keduanya tidak memberikan dampak signifikan ketika dianalisis secara terpisah.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama & peneliti Tahun	Varaibel yang diteliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang) Tias Monika Ferlia, Supami Wahyu Setyowati, Ati Retnasari , Mochamad Fariz Irianto/2023	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) Kualitas Laporan keuangan (Y)	Terdapat pada variabel akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan	Terdapat pada tempat obyek peneitian yang dilakukan pada BPKPD Kabupaten Malaka	Berdasarkan hasil penelitian ini secara simultan menunjukan bahwa bahwa akuntabilitas, transparansi dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2.	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman Azza Nur Zubaidah, Nugraeni/2023	Akuntabilitas (x1) Transparansi (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel Akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh.
3.	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Kembang Seri Iwin Arnova, Onikka Niken Lestari/2024	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel Akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Saat ini, akuntabilitas tidak berdampak.

4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (Bkd) Kabupaten Gorontalo Anatasya Putriyani Musa, Julie Abdullah, Wahyudin Hasan/2023	Sistem pengendalian Intern (X1) Akuntabilitas (X2) Kualitas Laporan keuangan Y)	Terletak pada variabel Sistem Pengendalian Intern, akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel transparansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, (2) akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo.
5.	Transparansi Dan Akuntabilitas dalam Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Nurni Arrina Lestari/2023	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel Akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
6.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa) Carolus Askikarno Palalangan/2019	Sistem Pengendalian Internal (X1) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel Akuntabilitas dan transparansi	Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan; dan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap

					kualitas laporan keuangan.
7.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bengkulu) Syafudin, Iwin Arnova Anggi Saputra/2021	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel Akuntabilitas dan transparansi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
8.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana Heinrich, Angela Probohudono, Agung Nur/2023	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X1) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel Akuntabilitas dan transparansi	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.
9.	Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo) Gabriela Ibrahim, Harun Blongkod, Herlina Rasjid/2024	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel Akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian secara simultan akuntabilitas dan

					transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
10.	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Satpol Pp dan Damkar Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nadia Putri Sari, Rina Asmeri, Meriyani/2024	Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terletak pada variabel Akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
11.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Irenius Alviano, Citra Ayudiyati/2024	Akuntabilitas, (X1) Transparansi (X2) Sistem Pengendalian Internal (X3) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Terdapat pada variabel Akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka	hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal dan Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal.
12.	The Effect Of Government Internal Control System (SPIP) And Regional Management Information (Simda) On The Quality Of Financial Reports	Government Internal Control System (SPIP) (X1) Regional Management Information (Simda) (X2) The Quality Of Financial Reports (Y)	Terletak pada variabel sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan	Terletak pada tempat obyek penelitian yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Malaka serta penambahan variabel akuntabilitas dan transparansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah saja yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan secara stimulan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem

	Reni Sulastris, Gatot Wahyu Nugroho dan Idang Nurodin/2020				Informasi Manajemen Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
--	---	--	--	--	--

Sumber : Sumber Artikel Ilmiah, 2025

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1. Standar Akuntansi Pemerintah

2.2.1.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan.

Dengan demikian, penyelenggaraan akuntansi di pemerintah daerah harus merujuk baik pada Standar Akuntansi Pemerintahan maupun pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam praktiknya, dua rujukan tersebut disinkronkan di dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah tercatat secara akurat dan transparan. Selain itu,

kebijakan akuntansi yang diterapkan juga harus mencerminkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang mendukung pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Dengan penerapan sistem akuntansi yang baik, laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban kepada publik.

2.2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini bertujuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi pemerintah. SAP disajikan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang mencakup judul, nomor, serta tanggal mulai berlaku. Selain itu, Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga disertai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Sesuai dengan peraturan tersebut, implementasi SAP mengharuskan setiap entitas yang melakukan pelaporan, termasuk pemerintah daerah, untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai secara sistematis dan terstruktur dalam periode laporan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memperbaiki akuntabilitas, pengelolaan, keterbukaan, keseimbangan generasi, serta penilaian kinerja. Dengan implementasi SAP, laporan keuangan yang berguna dapat disiapkan. Peran laporan keuangan ditentukan oleh data yang terdapat dalam

laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) supaya informasi yang disampaikan memiliki arti dan penting.

Pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan. Hingga tahun 2013, pemerintah daerah masih menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 terletak pada dasar pencatatan transaksi serta jenis laporan keuangan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan aturan yang diketahui dan diikuti oleh para pembuat standar dalam merancang standar, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan saat melaksanakan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang diterapkan dalam akuntansi serta laporan keuangan pemerintah (PP No. Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 mencakup: dasar akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi lebih diutamakan daripada bentuk formal, prinsip periodisasi, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan menyeluruh, dan prinsip penyajian yang wajar.

2.2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

2.2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Mohammad Mahsun 2014), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi pertanggungjawabannya. Sementara menurut (Mardiasmo, 2009:20), Akuntabilitas publik adalah tugas dari pihak yang diberi amanah untuk menjelaskan, melaporkan, dan memperlihatkan semua kegiatan yang mereka kerjakan kepada pihak yang memberi amanah, yang berhak menuntut penjelasan dan tanggung jawab tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memberi jawaban tentang pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada entitas yang bertanggung jawab, agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas sudah menjadi kewajiban suatu organisasi pemerintah untuk menerangkan hasil kinerja apakah itu berhasil atau tidak, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara periodik.

Akuntabilitas adalah laporan segala hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat di dalamnya, pelaksanaan pembangunan sesuai hasil musyawarah mufakat, dan bentuk akhir dari kegiatan tersebut akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Putri Muliana, Sopanah, and Hasan 2023).

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban yang melekat pada pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup tugas untuk memberikan, melaporkan, dan memaparkan informasi mengenai hasil kerja dan kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang diberi amanah (principal) yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga mencakup cara penggunaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada pihak yang wajib melaporkan, yang harus dilakukan secara rutin agar tercapai transparansi. Menurut (Mardiasmo, 2009:23), akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kewajiban pejabat publik atau lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan:
 - a. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan pelaksanaan misi dilakukan secara akuntabel.

- b. Sistem yang diterapkan harus mampu menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sistem akuntabilitas dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Fokus utama harus diarahkan pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Pelaksanaan akuntabilitas harus dilakukan dengan jujur, objektif, transparan, dan inovatif berfungsi sebagai katalisator atau pendorong untuk perubahan manajemen instansi pemerintah melalui pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

2.2.2.2 Tujuan Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2009:20-21), tujuan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kepercayaan publik terhadap organisasi. Akuntabilitas bertujuan membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi secara konsisten mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber dayanya kepada publik, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting bagi keberlangsungan dan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsinya.

2. Mendorong terciptanya transparansi dan reponsivitas organisasi. Akuntabilitas mendorong organisasi untuk lebih terbuka (tranparan) dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan, prosedur, dan hasil kerjanya selain itu akuntabilitas juga mendorong responsivitas organisasi kemampuan organisasi untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang kinerja kebijakan orrganisasi. Informasi ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kinerja organisasi.

Sementara tujuan akuntabilitas menurut (Mahmudi, 2010:23), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja organisasi. Akuntabilitas berperan penting dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi. Ketika sebuah organisasi dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya, maka organisasi tersebut akan berupaya untuk mencapai hasil yang lebih baik.
2. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas memberikan mekanisme bagi organisasi untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas masyarakat akan lebih percaya bahwa

organisasi telah menjalankan fungsinya dengan baik dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.

Dari tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan sebagai penghubung organisasi dan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif melainkan komitmen moral mendorong organisasi bertindak bertanggung jawab, membangun kepercayaan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2.2.2.3 Fungsi Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018-21), akuntabilitas memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengendalian dalam tata kelola publik. Fungsi ini memiliki dua aspek utama:

1. Pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan - Akuntabilitas menjadi mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik tidak disalahgunakan. Dengan adanya tuntutan akuntabilitas, setiap keputusan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang jelas.
2. Pengendalian terhadap penggunaan sumber daya publik - Akuntabilitas memastikan bahwa anggaran, aset, dan sumber daya publik lainnya dikelola dengan bertanggung jawab, efisien, dan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
3. Memberikan suatu pernyataan yang jelas mengenai ketepatan tujuan dan sasaran atas pelaksanaan program serta kebijakan yang ditetapkan.

4. Mengukur suatu pencapaian dan perkembangan tujuan organisasi sesuai dengan program dan kebijakannya.
5. Sebagai alat kontrol sesuai dengan perencanaan awal.
6. Menyajikan informasi secara akurat yang digunakan pemimpin dalam mengambil keputusan.

Melalui fungsi pengendalian ini, akuntabilitas mendorong terciptanya transparansi dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga publik, sehingga kepercayaan terhadap institusi publik dapat terjaga dan penggunaan kekuasaan serta sumber daya publik benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.2.2.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ada beberapa indikator akuntabilitas meliputi:

1. Kepatuhan terhadap peraturan. Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Keterbukaan informasi publik. Laporan keuangan harus tersedia untuk publik.
3. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Anggaran harus digunakan untuk mencapai hasil yang optimal.
4. Pengawasan dan evaluasi. Adanya mekanisme audit dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

5. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu. Laporan harus disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sementara menurut (Mahmudi 2019), menyampaikan bahwa akuntabilitas publik indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas manajerial, merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya.
3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung-jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

2.2.3 Tranparansi (*Transparency*)

2.2.3.1 Pengertian Transparansi

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memperoleh akses informasi secara luas mengenai keuangan daerah. Transparansi memastikan akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, transparansi diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan yang jelas dan dapat dipercaya kepada publik. Konsep ini berlandaskan pada pemahaman bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi secara terbuka dan menyeluruh mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta kepatuhannya terhadap peraturan. Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada publik, berdasarkan keyakinan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap tentang pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta kepatuhannya terhadap supremasi hukum (Ga'a, Hasan, and Puspitosarie 2022).

Kemudian (Mardiasmo, 2019), transparansi merujuk pada upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pemerintah memiliki kewajiban

untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, transparansi merupakan prinsip yang menuntut organisasi atau lembaga untuk menyediakan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Menurut (Bastian I 2020), transparansi merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam ranah pemerintahan, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan, pengelolaan anggaran, serta hasil kinerja pemerintah.

Tujuan utama transparansi adalah untuk memperbaiki akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Menurut (Prabowo 2021), transparansi memiliki tujuan untuk menciptakan suasana di mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi memiliki tujuan untuk mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan menjamin bahwa segala tindakan dan keputusan dapat dipantau oleh masyarakat.

Adapun manfaat dari transparansi menurut (Sari, 2020) manfaat dari akuntabilitas meliputi:

1. transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik lainnya

2. transparansi memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif
3. transparansi juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi, karena informasi yang terbuka akan lebih mudah diawasi oleh publik.

2.2.3.2 Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk mencapai tingkat transparansi yang tinggi. Menurut (Mardiasmo 2020) prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Keterbukaan. Informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak.
2. Akuntabilitas. Organisasi harus bertanggung jawab atas informasi yang disajikan dan siap memberikan penjelasan jika diperlukan.
3. Keterjangkauan. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan tidak membingungkan bagi masyarakat.
4. Konsistensi. Informasi yang disajikan harus konsisten dari waktu ke waktu agar dapat dibandingkan dan dianalisis dengan baik.

2.2.3.4 Indikator Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Mardiasmo (2018) menyampaikan indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif), merupakan pemberian informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Openness (keterbukaan), merupakan keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk dapat memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
3. Disclosure (pengungkapan), merupakan pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

2.2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan salah satu elemen penting dalam struktur organisasi yang digunakan untuk mengawasi aktivitas entitas oleh manajemen guna memastikan terlaksananya tata kelola yang baik. Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian integral dari proses manajemen Perusahaan Terbuka yang dibentuk untuk memberikan keyakinan memadai bahwa operasi dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas. Sistem Pengendalian Interna

Pemerintah adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut (Ayem and Kusumasari, 2020) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Menurut Mulyadi (2013) yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: “Pengendalian Intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan SPIP adalah Proses yang dilakukan organisasi untuk memberikan jaminan tercapainya efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi.

Dalam sistem pengendalian intern (COSO), pengendalian tidak menitikberatkan pada kegiatan pengendalian, namun menitik beratkan pada lingkungan pengendalian sebagai syarat befungsinya sistem pengendalian intern (Winarno, 2006:11). Faktor manusia sebagai pembentuk lingkungan pengendalian, mendapat perhatian yang besar, misalnya dengan adanya situasi yang etis dan moral, masalah integritas, dan adanya komitmen pemimpin pada kompetensi. Sistem pengendalian intern yang efisien tidak harus mengendalikan semua kegiatan dengan pertimbangan efisiensi, sehingga organisasi harus menentukan tujuan secara jelas dan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengelola risiko yang ada. Berdasarkan hasil analisa tersebut ditentukan pengendalian untuk meminimalkan risiko.

Pelaksanaan sistem dan prosedur pengendalian diperlukan kondisi yang kondusif serta jalur informasi dan komunikasi yang baik serta adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. Dalam konsep COSO, organisasi diharuskan memiliki lingkungan yang baik, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan melakukan pemantauan secara terus menerus. Selain itu, organisasi harus mampu menilai dan mengelola risiko yang mungkin timbul, serta mengembangkan kapasitas untuk merespon perubahan yang terjadi. Dengan pemantauan yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara keseluruhan, pengendalian internal yang baik memungkinkan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan. Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.
3. Pengamanan aset negara. Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2013:163), tujuan sistem pengendalian internal adalah : Menjaga kekayaan organisasi, Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efisiensi, dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penerapan sistem pengendalian internal bermaksud untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, penyelewengan, penghambatan, pemborosan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan saran serta

penerapan tugas-tugas organisasi. Tujuan pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan keterkaitan dalam pencapaian tujuan serta pelaksanaan tugas organisasi.

Menurut (Fitrianty, 2017) Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dihadapkan dengan kendala kendala yang antara lain:

1. Kompetensi SDM belum memadai
2. Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
3. Terbatasnya anggaran
4. Kurangnya kepatuhan
5. Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi
6. Terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Operasional

2.2.4.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meliputi berbagai aspek yang menjadi dasar penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya negara. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan sumber daya. Pengendalian internal yang baik akan mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik

secara berkelanjutan. Adapun indikator sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian suatu perusahaan/instansi mencakup seluruh sikap manajemen dan pengawai mengenai pentingnya pengendalian. Pimpinan instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi/perusahaan dapat menetapkan tujuannya pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Risiko harus diperhitungkan/diidentifikasi dan segera diambil langkah untuk mengendalikan sehingga tujuan pengendalian internal dapat dicapai. Setelah dilakukan analisis untuk memperkirakan besarnya pengaruh dari risiko tersebut serta memungkinkan terjadinya, dan untuk menentukan tindakan yang meminimumkannya.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat serta tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian di antaranya dengan melakukan *job analysis*, yaitu melakukan review atas indikator dan ukuran kinerja, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting,

serta pemisahan fungsi. Selain itu dengan melakukan tindakan tegas terhadap pengawai atas perraturan yang ada agar tidak ada kecurangan dalam pekerjaan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Pimpinan instansi/perusahaan wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, serta mengikutsertakan pengawai dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut aktivitas kinerja pengawai.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan pengendalian internal akan mengidentifikasi dimana letak kelemahannya dan memeperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Pemantauan pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia dalam instansi/perusahaan.

2.2.5 Kualitas Laporan Keuangan

2.2.5.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen yang tersusun rapi dan mencakup kondisi keuangan serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang menyusun laporan tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja lembaga pemerintah, mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bukti tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan bisa

memberikan manfaat bagi pengguna bila informasi yang terdapat di dalamnya memiliki kualitas yang baik dan relevan dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik kualitas laporan keuangan mencakup berbagai persyaratan yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Menurut Said dan Noch (2018:13) Kualitas laporan keuangan didapatkan dari proses mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat semua transaksi ekonomi atau keuangan yang terjadi di suatu entitas akuntansi dalam pemerintahan pusat. Laporan ini bertujuan memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dan membantu para pihak dalam mengambil keputusan ekonomi. Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada ketepatan dan keandalan dalam mencatat semua transaksi yang terjadi.

2.2.5.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Suatu laporan Keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi 4 kriteria pokok yaitu:

1. Relevan (*Relevant*)

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di

masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, informasi yang relevan yaitu:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan dengan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal (*Reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan, informasi yang andal memenuhi karakteristik tersebut. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a. Penyajian jujur. Informasi yang disajikan harus mencerminkan dengan tepat seluruh transaksi dan kejadian lainnya yang seharusnya dicatat, atau yang secara wajar dapat diprediksi untuk dicatat.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji, dan jika diuji oleh pihak yang berbeda lebih dari sekali, hasilnya tetap memberikan kesimpulan yang hampir sama.
- c. Netralitas. Informasi disusun untuk memenuhi kebutuhan secara umum dan tidak memihak pada kepentingan pihak manapun.

3. Dapat Dibandingkan (*Comparability*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami (*Understandability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pengguna, dengan menggunakan bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah pada Komite Standar Akuntansi Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu:

1. Relevansi
2. Keandalan
3. Dapat dibandingkan
4. Kejelasan dan pemahaman
5. Kepatuhan terhadap peraturan

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan, dengan variabel bebasnya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan latar belakang serta kajian yang telah dijelaskan di atas, bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan daerah diperlukan akuntabilitas, transparansi, serta sistem pengendalian internal pemerintah.

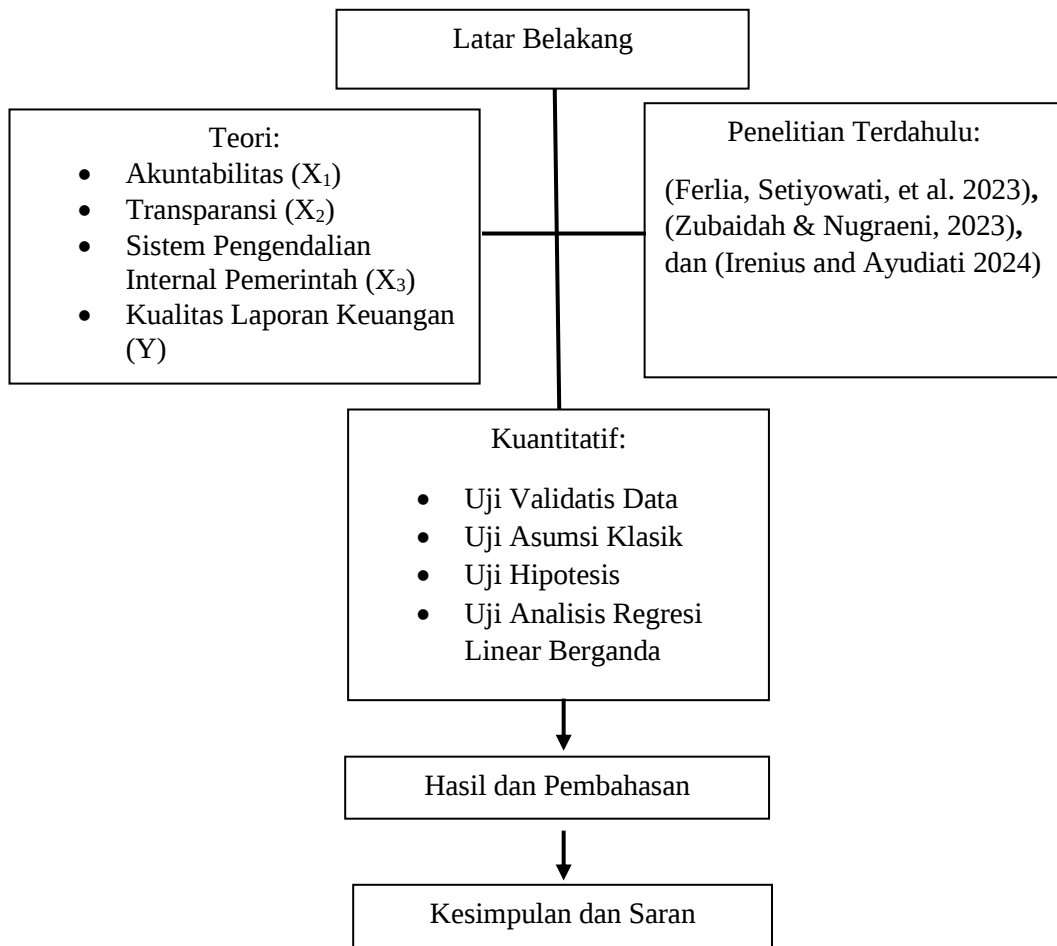
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya

publik secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas yang tinggi mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selain dengan akuntabilitas, transparansi berperan dalam memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas.

Penerapan sistem pengendalian internal yang efisien dapat berkontribusi dalam memastikan tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan memperhatikan aspek ketepatan waktu dan keandalan dalam pelaporannya. Seiring dengan hal tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai berikut:

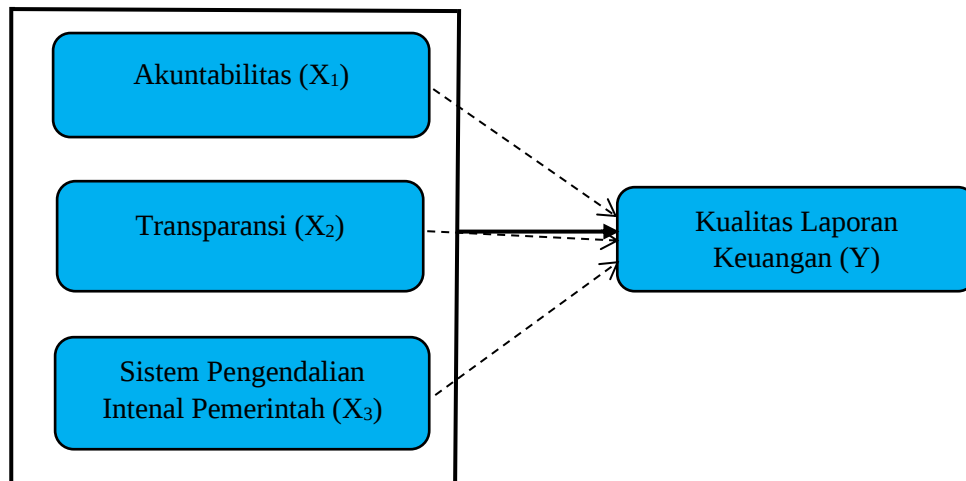
Gambar 2. 1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Disusun oleh peneliti, 2025

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 2
Kerangka Konseptual



Sumber: Disusun Oleh Peneliti, 2025

Keterangan:

X₁ = Variabel independen 1, Akuntabilitas

X₂ = Variabel independen 2, Transparansi

X₃ = Variabel independen 3, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Y = Variabel dependen, Kualitas Laporan Keuangan

-----> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Secara Parsial

—————> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Secara Simultan

2.5 Hipotesis

Menurut (Sugiyono 2018) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana suatu rumusan masalah penelitian biasanya dilakukan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban yang telah diberikan baru didasarkan terhadap teori yang relevan, belum didasari oleh fakta-fakta, sehingga jawaban tersebut masih bersifat sementara.

2.5.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta hak dan pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk memberi jawaban tentang pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada entitas yang bertanggung jawab, agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas sudah menjadi kewajiban suatu organisasi pemerintah untuk menerangkan hasil kinerja apakah itu berhasil atau tidak, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara periodik.

Hasil Penelitian (Ferlia, Setiyowati, et al. 2023) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Hasilnya bahwa Akuntabilitas berpengaruh secara parsial positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara .

H1: Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.5.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2019) transparansi merujuk pada upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, transparansi merupakan prinsip yang menuntut organisasi atau lembaga untuk menyediakan informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Dalam penelitian (Ferlia, Setiyowati, et al. 2023) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” hasilnya bahwa transparansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan secara parsial transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan dalam penelitian oleh (Lestari, 2023) dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas dalam Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi” hasilnya bahwa

transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Zubaidah & Nugraeni, 2023) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman” menyatakan bahwa transparansi berpengaruh parsial positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Transparansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.5.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Interna Pemerintah adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam penelitian (Syafudin 2021) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian itu didukung oleh (Ferlia, Setiyowati, et al. 2023) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Daerah” hasilnya bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H3: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.5.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian (Ferlia, Setiyowati, et al. 2023) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” hasilnya menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka hipotesis disusun sebagai berikut:

H4: Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan